

POLITIK EKONOMI ISLAM DALAM NARASI PEMBANGUNAN NASIONAL

Dr. Muhammad Ramadhan, M.A

**POLITIK EKONOMI
ISLAM DALAM NARASI
PEMBANGUNAN
NASIONAL**

Sambutan Rektor UIN Sumatera Utara Medan

Prof. Dr. K.H. Saidurrahman, M.Ag

LKiS

POLITIK EKONOMI ISLAM DALAM NARASI PEMBANGUNAN NASIONAL

Dr. Muhammad Ramadhan, M.A

@Dr. Muhammad Ramadhan, M.A, *LKiS*, 2018

x + 222 halaman: 15,5 x 23 cm

1. Politik 2. Ekonomi Islam 3. Pembanguna nasional

ISBN: 978-602-6610-66-9

Sambutan Rektor UIN Sumatera Utara: Prof. Dr. K.H. Saidurrahman, M. Ag

Editor: Faisal Riza

Rancang sampul: Ruhtata

Setting/*Layout*: Tim Redaksi

Penerbit & Distribusi:

LKiS

Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul

Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta

Telp.: (0274) 387194

Faks.: (0274) 379430

<http://www.lkis.co.id>

e-mail: lkis@lkis.co.id

Anggota IKAPI

Cetakan I: 2018

Percetakan:

LKiS

Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul

Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta

Telp.: (0274) 417762

e-mail: lkis.printing@yahoo.com

SAMBUTAN

Prof. Dr. K.H. Saidurrahman, M.Ag

Rektor UIN Sumatera Utara Medan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Swt., karena atas karunia kesehatan, keluangan waktu kita dapat menjalankan tugas sehari-hari. Selawat dan dalam senantiasa kita ucapkan untuk Nabi Besar Muhammad Saw. Semoga kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat di akhirat. Amin amin allahuma amin.

Tugas akademisi adalah misi pencerahan bagi publik luas, masyarakat baik sebagai pengambil kebijakan maupun masyarakat yang bergerak disektor non pemerintahan, ekonomi, perdagangan dan aktivitas lainnya. Misi pencerahan melalui mimbar akademik berupa publikasi karya berupa buku adalah salah satu bentuknya. Saya mengapresiasi civitas akademik yang tekun melahirkan karya, seperti yang dilakukan saudara Dr. Ramadhan, ditengah kesibukan sebagai wakil rektor II, beliau masih menyempatkan waktu untuk menuangkan ide gagasan dalam sebuah karya yang luar biasa dengan judul *Politik Ekonomi Islam dalam Narasi Pembangunan Nasional*.

Buku ini sangat penting dibaca oleh kalangan akademisi yang bergelut dalam bidang ekonomi Islam, saya merekomendasikan dapat

vi Politik Ekonomi Islam...

digunakan oleh para mahasiswa di UIN khususnya prodi-prodi yang berkaitan dengan aspek ekonomi. Akhirnya saya berharap agar kontribusi penulis bagi dunia akademik membawa pencerahan bagi masyarakat. Selamat membaca!

PENGANTAR PENULIS

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluangan waktu untuk berkarya sebagai akademisi dengan hadirnya buku ini sebagai bagian dari sumbangan pemikiran penulis terhadap dunia akademik di Indonesia.

Saya menyadari di tengah-tengah kesibukan yang penulis jalani sebagai akademisi di kampus UIN Sumatera Utara Medan, buku ini adalah bagian dari proses panjang pemikiran, refleksi kritis atas berbagai persoalan politik ekonomi Islam dengan kaitannya terhadap perkembangan narasi pembangunan nasional. Pada titik ini agama, khususnya Islam menjadi variabel penting dalam diskursus pembangunan nasional.

Saya menyadari bahwa penelitian ini didasarkan pada kegelisahan dan sensitivitas akademik penulis dalam pergulatannya dengan realitas di lapangan tentu masih memiliki banyak cela sebagai kekurangan maupun kelemahan. Namun, sebagai pertanggungjawaban akademik, dan agar publik dapat memberikan respon masukan dan kritikan, serta barangkali dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada kalayak, maka buku yang ada ditangan pembaca ini saya hadirkan.

Buku dengan judul *Politik Ekonomi Islam dalam Narasi Pembangunan Nasional* adalah ikhtiar penulis dalam berkontribusi bagi masyarakat. Kehidupan masyarakat yang kompleks dengan segala persoalan memang menghendaki didekati dari berbagai multiperspektif. Salah satunya adalah perspektif politik. Bidang yang saya geluti sebagai akademisi.

Kepada semua pihak, institusi kampus, UIN Sumatera Utara tempat saya bernaung, kepada rekan-rekan akademisi dan praktisi baik di kampus maupun di lapangan, saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Berkat dorongan dan dukungan dari semuanya karya ini akhirnya dapat terselesaikan. Kepada keluarga istri dan anak-anak, berkat doa dan dukungan lahir batin, karya ini saya persembahkan.

Akhirnya, semoga buku ini dapat membawa manfaat bagi kalangan akademisi maupun masyarakat luas. Kepada Allah saya mohon ampun atas kesalahan yang terdapat dalam karya ini.

DAFTAR ISI

Sambutan Rektor UIN Sumatera Utara Medan:

Prof. Dr. K.H. Saidurrahman, M.Ag ____v

Pengantar Penulis ____vii

Daftar Isi ____ix

BAB I PENDAHULUAN __1

1.1. Latar Belakang Kajian __1

1.2. Sistematika Kajian __7

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL __9

2.1. Konsep Revolusi Mental __9

2.1.1. Revolusi Mental sebagai Gerakan Perubahan Sosial Ekonomi
__15

2.1.2. Nilai-Nilai Esensial Revolusi Mental __18

2.2. Nilai-nilai Agama dalam Pembangunan Ekonomi __21

2.2.1. Nilai Agama, Etos Kerja, dan Produktivitas Manusia __27

2.2.2. Transformasi Nilai Agama dalam Perilaku Ekonomi __32

2.3. Tokoh Agama sebagai Agen Perubahan __35

2.3.1. Model Interpretasi Nilai Agama oleh Tokoh Agama __41

2.3.2. Tokoh Agama dan Gerakan Perubahan Sosial Ekonomi __45

2.4. Perkembangan dan Upaya Reorientasi Pembangunan Ekonomi
__49

x Politik Ekonomi Islam...

2.4.1. Perkembangan Ekonomi Indonesia __54

2.4.2. Orientasi Pembangunan Ekonomi __60

BAB III ANALISIS SITUASI SOSIAL, KEAGAMAAN DAN MENTALITAS BANGSA __65

3.1. Gambaran Umum Kehidupan Keagamaan __65

3.1.1. Memahami Kemiskinan __71

3.1.2. Sinergitas Agama sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan __82

3.1.3. Peran Tokoh Agama dalam Pembangunan Ekonomi __85

3.1.4. Peran Lembaga Sosial Keagamaan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat __89

3.2. Mentalitas Perilaku Masyarakat __104

3.2.1. Hambatan Budaya dalam Pengembangan Ekonomi __111

3.2.2. Budaya Negatif dalam Pembangunan: Konsumerisme, Hedonisme, Monopoli, dan Eksploitasi __117

BAB IV ARAH POLITIK EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL INDONESIA __123

4.1. Pergeseran Pemikiran Pembangunan Ekonomi __123

4.2. Politik Pembangunan Ekonomi Berbasis Nilai Agama __128

4.3. Kerjasama Agamawan dan Pemerintah untuk Pembangunan Ekonomi __135

4.4. Lanskap Pembangunan Politik Ekonomi Islam __146

4.5. Peluang dan Tantangan Orientasi Politik Ekonomi Islam __163

BAB V PENUTUP __201

Bibliografi __205

Indeks __217

Tentang Penulis __221

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kajian

Terdapat beberapa isu menarik yang dapat dijadikan sebagai topik kajian dan penelitian empiris dalam disiplin ilmu-ilmu sosial, di antaranya adalah penelitian-penelitian dengan tema agama dan pembangunan. Para sosiolog dan antropolog dalam melakukan kajian ilmiah, melihat hubungan antar agama dan pembangunan dalam konteks fungsional dan praksis sosial. Dari sisi ajaran, agama mendapat tempat sebagai sumber rujukan dan landasan etik-moral dalam pembangunan. Hal tersebut tercermin pada aktualisasi nilai-nilai ajaran agama dalam pelaksanaan pemangunan dan kehidupan sosial masyarakat. Adapun para pemuka agama, yang merupakan tokoh elit dalam agama, dilihat sebagai actor sosial yang dapat menerjemahkan ajaran-ajaran agama untuk diterapkan di dalam kehidupan nyata. Kehadiran para agamawan yang berkedudukan sebagai tokoh penggerak kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, bertujuan untuk mengarahkan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu dimensi pembangunan yang dapat mendorong kemajuan masyarakat. Adapun

2 Politik Ekonomi Islam...

ukuran dari tingkat kemajuan ekonomi di masyarakat adalah tingkat produktivitas dan etos kerja guna meraih pencapaian yang tinggi. Dalam konteks inilah nilai-nilai ajaran agama harus dimaknai sebagai faktor pendorong terhadap kemajuan dengan menumbuhkan etos kerja tinggi, yang berorientasi pada peningkatan produktivitas ekonomi. Berangkat dari hal ini, maka perlu dibuat suatu analisa terkait hubungan antara nilai-nilai ajaran suatu agama dengan perilaku ekonomi di masyarakat, yang tercermin pada adanya dorongan untuk bekerja produktif yang akan bermuara pada kemajuan. Agama-agama yang mendominasi di Indonesia, dengan jelas memuat ajaran untuk kerja produktif yang memberi manfaat ekonomi bagi kelangsungan hidup umatnya.

Islam sebagai salah satu agama, juga menganjurkan para pemeluknya untuk bekerja keras. Bekerja di dalam Islam juga dimaknai sebagai ibadah. Hal tersebut sebagaimana yang termuat dalam Q.S. Al-Jumuah: 10. Perintah bekerja dalam Islam juga bermaksud sebagai peringatan bagi manusia agar tidak membiarkan generasi berikutnya hidup dalam kemiskinan ekonomi dan iman, sebagaimana yang termaktub di dalam Q.S. An-Nisa: 9. Tidak hanya di dalam Al-Quran, banyak juga hadits nabi yang menyatakan bahwa umat yang kuat – secara ekonomi- lebih penting dan lebih dihargai jika dibandingkan dengan umat yang lemah. Bahkan seseorang harus dapat hidup berdikari dan tidak boleh bergantung secara ekonomi kepada orang lain (HR Tirmidzi). Di dalam Q.S. An-Nisa: 29, Allah memerintahkan umat Islam untuk dapat menjalankan kegiatan perekonomian dengan baik, menjaga amanah, dan kepercayaan orang lain. Dalam hal ini, perdagangan merupakan representasi kegiatan ekonomi dengan cara yang halal.

Kristen sebagai sebuah agama sudah dengan jelas menunjukkan hubungan langsung antara ketaatan dalam beragama dengan semangat kegiatan ekonomi. Sejarah telah membuktikan dalam perjalanan umat Kristiani bahwa hubungan antara ketaatan dengan semangat bekerja telah menjadi kekuatan pendorong kebangkitan kapitalisme Eropa

Barat. Karya klasik yang ditulis oleh Weber (1930 [1905]) yang berjudul *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, dengan tegas menyebutkan bahwa agama -doktrin Kristen- berperan besar untuk menciptakan nilai-nilai etos kerja, di antaranya adalah hidup hemat, rasionalisme, asketisisme, dan “panggilan” agar manusia senantiasa bekerja di dunia, dengan harapan akan mendapat ganjaran dan pahala di akhirat. Weber juga mengaitkan dimensi eskatologis yang terkandung di dalam ajaran Kristen dengan dorongan dan semangat bekerja dan kegiatan-kegiatan ekonomi di dunia nyata yang profan.

Selain dua agama di atas, agama Buddha juga memperkenalkan konsep-konsep religius yang memiliki dimensi ekonomi, yang berpusat pada pemaknaan konsep keuntungan yang harus berdimensi ganda, yaitu kepentingan pribadi (*suka*) dan kepentingan bersama (*hita*). Oleh karena itu, prinsip-prinsip kerja tersebut bertujuan untuk mencapai kebahagiaan diri sendiri dan kebahagiaan orang lain. Konsep tersebut berkembang dari pemahaman bahwa sumber daya ekonomi bersifat terbatas, sehingga setiap orang harus dapat menekan ego individual untuk tidak bertindak berlebihan dalam mengambil keuntungan atas sumber daya ekonomi tersebut. Etos kerja menurut ajaran Buddhisme merujuk pada empat nilai/norma utama, yaitu: 1) *Utthanasampada* merupakan perwujudan dari kerja keras seseorang yang dilandasi atas sikap bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan; 2) *Arrakhsampada* merupakan sikap berlaku adil dengan melakukan pendistribusian harta dan kemakmuran terhadap sesama; 3) *Kalyanamittata* merupakan wujud dari kepemilikan jaringan sosial yang kuat untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan; dan 4) *Samivajivita* yaitu adanya usaha untuk menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan rohani.

Hindu sebagai agama juga memiliki konsep tentang bekerja. Di dalam agama Hindu dikenal konsep *Artha* sebagai tujuan hidup. *Artha* diartikan sebagai keberhasilan atau kesuksesan yang diwujudkan dalam bentuk materi/uang. Hal itu juga berarti bahwa dalam agama Hindu,

4 Politik Ekonomi Islam...

manusia yang hidup memerlukan materi atau uang untuk dapat terus melangsungkan kehidupannya. Tanpa materi tersebut, maka manusia tidak akan mampu melangsungkan kehidupannya, baik kehidupan berumah tangga, pendidikan, serta kewajiban-kewajiban dalam beragama. Meskipun demikian, untuk mendapatkan materi maupun kesuksesan harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan agama dan juga harus dipergunakan sesuai dengan tuntutan nilai-nilai agama.

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa Indonesia merupakan Negara heterogen, yang terdiri dari berbagai agama, suku, dan bangsa. Hal itu menjadikan Indonesia memiliki modal sosial besar yang berasal dari komunitas-komunitas keagamaan, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya pembangunan. Tidak dapat dibantah, bahwa pengaruh agama dalam proses pembangunan, termasuk dalam pembangunan sosial-ekonomi, semakin nyata adanya. Kuatnya faktor agama tersebut, mengakibatkan pentingnya melakukan reorientasi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada nilai-nilai agama. Reorientasi tersebut dilakukan antara lain dengan merumuskan- ulang *policy prescriptions* dalam bentuk kebijakan yang berlandaskan pada keadilan, berdaya tahan, dan memiliki daya saing tinggi dalam proses pembangunan ekonomi. Usaha reorientasi tersebut juga dapat ditempuh dengan melakukan gerakan revolusi mental yang bertumpu pada para pemuka agama dalam menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi produktif, tentunya kegiatan yang membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, salah satu usaha untuk mereorientasi pembangunan ekonomi adalah dengan melakukan revolusi mental. Revolusi Mental merupakan gerakan kolektif dengan melibatkan seluruh bangsa dan diaplikasikan melalui internalisasi nilai-nilai esensial pada individu, keluarga, insititusi sosial, masyarakat sampai dengan lembaga-lembaga negara. Nilai-nilai esensial tersebut meliputi etos kemajuan, etika kerja,

motivasi berprestasi, disiplin, taat hukum dan aturan, berpandangan optimistis, produktif-inovatif1adaptif, kerja sama dan gotong royong, dan berorientasi pada kebajikan publik dan kemaslahatan umum. Sebagai usaha untuk mewujudkan Indonesia yang maju, makmur dan sejahtera serta mandiri, maka diperlukan manusia-manusia unggul dengan pendidikan yang baik, memiliki keahlian dan keterampilan, menguasai teknologi, pekerja keras, mempunyai etos kemajuan; melihat masa depan dengan sikap optimis dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang mengakar di kalangan masyarakat Indonesia, seperti bergotong royong, toleransi, solidaritas, serta nilai-nilai luhur lainnya.

Selain itu, penting kiranya bagi Indonesia untuk berkaca kepada pengalaman negara-negara maju yang ada di berbagai belahan dunia lainnya demi mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri. Terwujudnya keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh sikap masyarakat di sebuah Negara terhadap etos kerja, pengelolaan harta, pembinaan keluarga serta perawatan anak, motivasi berprestasi, serta keinginan untuk selalu melakukan penemuan (*invention*) dan pembaharuan (*innovation*). Keseluruhan sikap dan perilaku tersebut berangkat dari akal budi dan pikiran manusia yang dalam konteks masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan oleh nilai-nilai agama.

Terkait pandangan tersebut, banyak akademisi yang telah mengkaji perihal peran agama dalam pembangunan. Namun perlu dicatat bahwa kajian-kajian yang telah ada pada umumnya bersepakat bahwa agama, dengan nilai-nilai yang dipercaya oleh para penganutnya, mampu mempengaruhi tatatan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu Anderson (1983) meyakini bahwa agama merupakan bagian dari *cultural artefacts* yang melalui media *the sacred languages* (bahasa-bahasa suci) telah memberikan rasa optimisme kepada manusia (Anderson, 1983:19; Ali, 2014). Modal optimisme tersebutlah yang seharusnya sangat perlu dimiliki oleh semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun tokoh agama, untuk melancarkan

6 Politik Ekonomi Islam...

agenda revolusi mental. Adapun target akhir yang ingin dicapai dari revolusi mental ini adalah untuk membangkitkan kesadaran bahwa bangsa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif, dan berpotensi menjadi bangsa yang maju dan modern.

Uraian tersebut menjadi dasar untuk merealisasikan revolusi mental sebagai upaya mewujudkan bangsa Indonesia yang berkepribadian, berdaulat, serta mandiri, dan pastinya menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan tiga pilar utama dan satu pilar tata kelola yang merupakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Ketiga pilar tersebut, yaitu: (i) pembangunan dengan tetap melakukan pen jagaan terhadap keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, (ii) pembangunan dengan tetap melakukan pen jagaan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan (iii) pembangunan dengan tetap melakukan pen jagaan terhadap kualitas lingkungan hidup masyarakat, (iv) tata kelola dengan tetap menjaga pelaksanaan pembangunan dan terus meningkatkan kualitas kehidupan hingga generasi-generasi berikutnya.

Dalam indeks Gini 0,43, disebutkan bahwa pembangunan ekonomi belum berorientasi pada keadilan, pemerataan, dan pemihakan pada rakyat kecil. Hal tersebut terbukti dengan adanya ketimpangan antar kelompok masyarakat. Keadaan tersebut menciptakan deprivasi sosial yang mengarah pada eksklusi sosial. Agama sangat relevan untuk dijadikan sebagai landasan etis dalam merumuskan kebijakan dan mengubah orientasi pembangunan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan agama mengandung nilai-nilai mulia dan menyuarakan pesan-pesan profetis tentang keadilan sosial dan pemihakan pada kelompok-kelompok yang lemah (*mustadh'afin*).

1.2. Sistematika Kajian

Kajian ini dibagi kedalam enam bagian bab, sebagai langkah untuk mempermudah proses kajian dan pendalaman secara sistematis. Bab satu, pendahuluan. Dalam bab ini memuat latarbelakang atau analisa situasi yang menjadi alasan pentingnya kajian ini dilakukan. Bagian ini terdiri atas rumusan masalah utama, tujuan kajian, metode kajian, sasaran, keluaran dan manfaat, ruang lingkup kajian, pelaksana kajian, waktu pelaksanaan dan terakhir sistematika kajian.

Bab dua, kerangka teori. Bab ini berisi konsep revolusi mental sebagai pondasi dasar dalam membaca dan menjadi perspektif untuk memandu ke arah pembahasan lebih dalam. Revolusi mental yang dibahas adalah sebagai gerakan perubahan sosial ekonomi dan nilai-nilai esensial revolusi mental. Selain itu, juga dikaitkan dengan nilai-nilai agama dalam pembangunan ekonomi yang meliputi nilai agama, etos kerja dan produktivitas manusia dan transformasi nilai agama dalam perilaku ekonomi. Sub bab berikutnya adalah tentang tokoh agama sebagai agen perubahan, yang meliputi model interpretasi nilai agama oleh tokoh agama dan gerakan perubahan sosial ekonomi. Sub bab terakhir dalam bab ini berkaitan dengan perkembangan dan upaya reorientasi pembangunan ekonomi yang memuat tentang perkembangan ekonomi dan orientasi pembangunan ekonomi.

Bab tiga, analisa situasi sosial, keagamaan dan mentalitas bangsa. Dalam bab ini poin penting yang ingin dibingkai adalah gambaran umum terkait analisa situasi yang meliputi gambaran umum kehidupan beragama yang terfokus pada cara memahami kemiskinan, peran tokoh agama dalam pembangunan ekonomi, peran lembaga sosial keagamaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sub bab berikutnya berkaitan dengan mentalitas perilaku masyarakat meliputi hambatan budaya dalam pengembangan ekonomi dan budaya negatif dalam pembangunan meliputi konsumerisme, hedonisme, monopoli dan eksploitasi.

8 Politik Ekonomi Islam...

Bab empat fokus pada keterkaitan nilai agama, tokoh agama, gerakan revolusi mental, dan reorientasi pembangunan ekonomi. Bab ini terbagi kedalam tiga sub bab yang membahas tentang perubahan pemikiran dalam pembangunan ekonomi, upaya pembangunan ekonomi berbasis nilai agama dan tokoh agama sebagai penggerak revolusi mental untuk reorientasi pembangunan ekonomi.

Bab lima, Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

2.1. Konsep Revolusi Mental

Perubahan dunia biasanya dimulai dengan dua jalan, yaitu evolusi dan revolusi. Kedua jalan tersebut memiliki implikasi terhadap tataran mikro dan makro baik secara sosiologis, ekonomi maupun politik. Perubahan evolusi merupakan perubahan sosial dalam proses dan waktu lama tanpa adanya keinginan khusus masyarakat yang bersangkutan. Perubahan ini muncul karena adanya usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan hidup sesuai perkembangan masyarakat pada waktu tertentu. Perubahan revolusi adalah perubahan yang berlangsung secara cepat dan tidak ada kehendak atau direncanakan sebelumnya. Perubahan revolusi dapat terjadi karena sudah direncanakan sebelumnya atau tidak sama sekali.

Revolusi merupakan bagian dari proses perubahan sosial yang dinamis serta memiliki implikasi terhadap pergeseran tata-nilai dalam masyarakat. Secara konseptual, revolusi sering dipahami sebagai proses untuk mewujudkan terjadinya transformasi struktural dan kultural secara cepat, radikal, dan total di tengah-tengah masyarakat

yang tertindas, baik dalam tataran politik maupun sosial, yang secara *mainstream* merupakan perubahan struktur dari feodal-kolonial menjadi struktur demokratis.¹

Revolusi mental² yang diusung oleh Presiden Joko Widodo merupakan istilah yang sudah digunakan oleh beberapa tokoh dunia. Sejarah memberikan informasi bahwa kata revolusi memiliki makna yang mengikutinya, mulai dari revolusi Inggris yang melahirkan ‘*magna carta*’ (piagam besar) yang membatasi absolutisme kerajaan Inggris pada tahun 1215. Revolusi Amerika tahun 1776 yang menghasilkan “*Declaration of Independence*”; Revolusi Prancis tahun 1789 yang mendeklarasikan semboyan *Liberté, Egalité, Fraternité*.³

Istilah revolusi di Indonesia diungkapkan pertama kali oleh Tan Malaka melalui karyanya yang berjudul “Menuju Republik Indonesia” (1925). Dalam salah satu pidatonya, Tan Malaka menyampaikan bahwa:

“Revolusi Indonesia tiadalah akan semata-mata untuk menukar kekuasaan Belanda dengan kekuasaan bumi putera (Peperangan Kemerdekaan bangsa), tetapi juga untuk menukar kekuasaan hartawan Belanda dengan Buruh Indonesia (putaran-sosial). Jadi pergerakan kita sekarang, ialah nasionalis sosial, dan berpadanan dengan itu perkakas bertarung ialah perkakas militer (Karim-isme) bercampur dengan perkakas ekonomi dan politik, yakni mogok, boikot dan demonstrasi”⁴

¹ Sartono Kartodirdjo, “Beberapa Perspektif dalam Studi Revolusi Prancis dan Revolusi Indonesia”, dalam Henri Chambert Loir dan Hasan Muarif Ambary (ed) *Panggung Sejarah* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 106.

² Istilah revolusi mental pertama kali didengungkan oleh Frederick W. Taylor (*The Principles of Scientific Management*, 1911) istilah ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana terjadinya perubahan radikal, pola pikir untuk mengatasi masalah inefisiensi perusahaan melalui penerapan manajemen ilmiah. Ini mencakup perubahan pola pikir terkait hubungan kerja (“saling-berhadapan” menjadi “saling-tergantung”), landasan kerja (“opini subyektif” menjadi “sains obyektif”), etos kerja (“kepentingan pribadi” menjadi “kepentingan bersama”), dan penguasaan surplus (“akumulasi” menjadi “distribusi”). Penerapan manajemen ilmiah itu secara luas disebut Taylorisme atau Gerakan Efisiensi. Argumentasi lain menyebutkan istilah revolusi mental berasal dari Karl Marx dalam *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte* (*Die Revolution*, New York, 1852)

³ Lihat misalnya: Julian Hoppit, “The Nation, the State, and the First Industrial Revolution,” *Journal of British Studies* (April 2011). Hlm. 307-331.

⁴ Tan Malaka, *Naar de “Republiek Indonesia” (Menuju Republik Indonesia)*, Yayasan Massa, 1987, hlm.19. lihat juga: Tan Malaka, *Semangat Muda*, Ted Sprague (Mei 2007), hlm. 31.

Pengertian revolusi menurut Tan Malaka adalah perlawanan secara fisik, melalui berbagai aksi yang dapat menggulingkan sebuah kekuasaan. Menurut Tan jalur diplomasi merupakan bentuk basabasi yang ujungnya tidak dapat memenuhi tujuan dari revolusi itu sendiri.

Tokoh ke dua, yang mempopulerkan jargon revolusi adalah Presiden Soekarno. Menurut Soekarno, revolusi adalah jalan yang bertahap, jalan kehormatan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan hanya jalan pertumpahan darah semata namun lebih jauh dari itu yaitu untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Soekarno membagi tingkatan revolusi dalam beberapa tahap, sebagai berikut. Tahun 1945-1950, merupakan *physical revolution*. Tahap ini merupakan usaha bangsa Indonesia untuk mewujudkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Tahap ini kemudian disebut sebagai revolusi fisik. Bagi bangsa Indonesia, tahun 1950-1955 merupakan tahun terberat untuk tetap mempertahankan kehidupannya atau tidak mati. Oleh karena itu, periode ini merupakan tahun untuk menebus segala penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam revolusi fisik. Periode revolusi sosial-ekonomi yang berlangsung pada tahun 1956 bermaksud mewujudkan “tata-tentrem-karta-raharja”⁵ di kalangan bangsa Indonesia. Adapun periode investasi (*investment*) berlangsung sejak tahun 1955-sekarang. Periode investasi terdiri dari *investment of human skill*, *material investment*, dan *mental investment* yang merupakan *socialist construction* yaitu untuk amanat penderitaan rakyat.⁶

Merujuk revolusi mental yang diusung oleh Presiden Joko Widodo, pengertiannya lebih sederhana karena dilatarbelakangi oleh adanya realitas masyarakat yang menurut Joko Widodo mengalami

⁵ Wawan Tunggul Alam, *Demi Bangraku Pertentangan Sukarno Vs. Hatta*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 461-462.

⁶ Departemen Penerangan RI, *Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi dengan Tambahan Re-So-Pim Tahun Kemenangan Genta Suara Revolusi*, Surabaya: Pertjetakan Negara dan Pers Nasional, 1963, hlm. 158. Tunggul Alam, op cit, hlm. 462.

kemunduran, utamanya dalam kepribadian. Beberapa paragraf dalam tulisan di harian *Kompas* atas nama Joko Widodo menjelaskan:

“Ekonomi semakin berkembang dan masyarakat banyak yang bertambah makmur. Bank Dunia bulan Mei ini mengatakan ekonomi Indonesia sudah masuk 10 besar dunia, jauh lebih awal dari perkiraan pemerintah SBY yang memprediksi baru terjadi tahun 2025. Di bidang politik, masyarakat sudah banyak menikmati kebebasan serta hak-haknya dibandingkan sebelumnya, termasuk di antaranya melakukan pergantian pemimpinnya secara periodik melalui pemilu yang demokratis. Namun, di sisi lain, kita melihat dan merasakan kegalauan masyarakat seperti yang dapat kita saksikan melalui protes di jalan-jalan di kota besar dan kecil dan juga di ruang publik lainnya, termasuk media massa dan media sosial. Gejala apa ini? Pemimpin nasional dan pemikir di Indonesia bingung menjelaskan fenomena bagaimana keresahan dan kemarahan masyarakat justru merebak. Sementara, oleh dunia, Indonesia dijadikan model keberhasilan reformasi yang menghantarkan kebebasan politik serta demokrasi bersama pembangunan ekonomi bagi masyarakatnya”.⁷

Berdasarkan argumentasi tersebut, revolusi mental merupakan perubahan mendasar dan fundamental dalam sikap, cara berpikir dan tindakan. Perubahan mentalitas masyarakat menjadi keharusan karena masyarakat telah mengalami disorientasi hidup, kehilangan tradisi luhur, serta disiplin dan etos kerja yang rendah.

Revolusi Mental Jokowi berbeda dengan revolusi lainnya, seperti revolusi Rusia yang memilih jalan revolusi dengan melakukan pergantian rezim, sistem dan struktur dan tatanan sosial ekonomi. Ada tiga hal utama yang menyebabkan terjadinya Revolusi Rusia, yaitu: 1) ketidakmampuan aparat pemerintah pusat dari rezim yang lama (*the old regime*); 2) meluasnya pemberontakan kelas bawah; 3) terjadinya upaya pemimpin politik yang memobilisasi masa untuk mengonsolidasikan negara revolusioner.⁸ Dalam hal ini, revolusi merupakan

⁷ Joko Widodo, 'Revolusi Mental' Kolom Opini, *Koran* harianKompas, Sabtu 10 Mei 2014.

⁸ Theda Skocpol, *Negara dan Revolusi Sosial Suatu Analisis Komparatif tentang Prancis, Rusia, dan Cina*, (Jakarta: Erlangga, 1991). hlm. 36-37.

tindakan dari suatu kelompok penduduk untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain dengan jalan kekerasan. Dengan kata lain penguasa dalam revolusi dapat berbuat apa saja, sedangkan pihak lawan atau yang tidak setuju terhadap kebijakan tersebut dianggap sebagai golongan reaksioner atau kontra revolusioner.⁹ Untuk itu, produk revolusioner adalah munculnya negara bangsa yang sentralistis birokratis dan bersifat inkorporasi massa dengan meningkatkan kekuasaan yang lebih besar di tingkat internasional.

Kekuasaan politik yang dimiliki rezim memiliki kehendak untuk bertindak secara tegas atas pilihan jalan politiknya dalam mengaktualisasikan visinya. Kekuasaan politik juga merupakan sebagian dari kekuasaan sosial yang fokusnya ditujukan kepada negara sebagai satu-satunya pihak yang berwenang yang mempunyai “hak” untuk mengendalikan tingkah laku sosial dengan paksaan.¹⁰

Dalam sejarah bangsa Indonesia, revolusi yang pernah terjadi adalah revolusi fisik.¹¹ Revolusi ini merupakan fase perjuangan untuk keluar dari cengkraman penjajahan. Fase ini melibatkan banyak kalangan khususnya pemuda. Pemuda sebagai penggerak revolusi yang sangat kuat, berada di posisi terdepan dengan strategi baru untuk mengoperasikan revolusi.¹²

Karina Supelli mencoba memberikan pemahaman secara lebih mendalam terkait makna revolusi mental. Penegasan ini disampaikan karena adanya kecenderungan dalam mendefinisikan sesuatu hanya

⁹ Deliar Noor, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 169.

¹⁰ Tentang penggunaan dan pengembangan kekuasaan militer, polisi, atau kekuasaan kriminal dengan kontrol yang sangat kuat terhadap kekerasan merupakan hal utama. Baca: Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 275.

¹¹ Revolusi fisik merupakan suatu bentuk perjuangan yang dilakukan dengan menciptakan konflik, pertempuran dan peperangan fisik. Perlawanan terhadap penjajah dari fase Belanda, Jepang merupakan rangkain revolusi fisik yang dilakukan bangsa Indonesia. Mohammad Sidki Daeng Materu, *Sejarah Pergerakan Nasional Bangsa Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), hlm. 5-7.

¹² Adam Malik, *Mengabdikan Republik* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), cetakan ke-2 angkatan 45, hlm. 63.

menurut penafsiran sesuai kepentingan tertentu dan cenderung mengabaikan substansi. Karlina memulai dengan memberikan definisi mental adalah sebagai "...nama bagi genangan segala sesuatu menyangkut cara hidup."¹³ Di dalam menjalankan kehidupan, terdapat tata cara yang masing-masing individu berbeda dalam menjalankannya, yaitu cara berpikir, memandang problem, merasa, mempercayai, ataupun cara berperilaku dan bertindak. Oleh karena itu, menurut Karlina istilah "mental" tidak hanya menyangkut urusan bathin, tetapi juga berkenaan dengan hal-hal yang bersifat ragawi.

Esensi pemahaman yang sama namun diungkapkan dalam nalar yang terbalik disimpulkan oleh seorang psikolog Amerika, Gordon W. Allport, seperti diungkapkan oleh Ignas Kleden, bahwa kepribadian tidak hanya mencakup aspek-aspek eksternal, akan tetapi juga mengandung hal-hal yang bersifat intrinsik.¹⁴ Oleh karena itu, menurut Allport kepribadian merupakan lembaga dinamis dari sistem psikofisik individu yang berperan dalam menentukan cara-caranya unik atau khas dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Argumentasi lain di tulis oleh Agus Sutisna¹⁵ dengan judul 'Landasan Ontologis Revolusi Mental', yang menguraikan tentang: apapun kecenderungan dan ruang lingkup pemaknaan yang digunakan; baik merujuk pada dimensi bathin atau watak manusia maupun sebagai satu kesatuan utuh antara dimensi bathin dan ragawi manusia pada hakekatnya adalah menyangkut soal watak-bathin, mindset, karakter dan kepribadian.

¹³ Karlina Supelli, "Arti Revolusi Mental", dalam laman Bayt al Hikmah Institute, <https://ahmadsamantho.wordpress.com/2014/07/04/mengartikan-revolusi-mental/> 30 Juni 2015.

¹⁴ Ignas Kleden, "Menerapkan Revolusi Mental", Kolom Opini, *Koran harianKompas*, 25 September 2014.

¹⁵ AgusSutisna:https://www.academia.edu/8922897/landasan_ontologis_revolusi_mental_sang_presiden/ 30 Juni 2015.

2.1.1.Revolusi Mental sebagai Gerakan Perubahan Sosial Ekonomi

Dalam perspektif sosiologis, masyarakat dipahami sebagai sebuah komunitas yang dinamis. Perubahan masyarakat terjadi karena struktur sosial yang terus bergerak seiring terjadinya kontak atau terjadinya pertemuan dari berbagai entitas masyarakat yang berbeda. Era *borderless society* yang ditandai dengan hilangnya sekat-sekat pembatas antar komunitas, hilangnya jarak demografis seiring kemajuan teknologi dan informasi menjadikan daya sentuh dan intensitas pertukaran informasi begitu cepat sehingga menjadikan perubahan sosial sulit dihindari.

Menurut Emile Durkheim, perubahan sosial dipahami sebagai akibat terjadinya klasifikasi sosial di masyarakat, menguatnya solidaritas sosial yang disesuaikan dengan kondisi demografis serta tantangan-tantangan yang dihadapi. Perubahan tersebut bisa berasal dari tradisional-mekanistik ke modernis-organisatoris (Lauer, 1982: Samuel, 2010). Perubahan sosial ini merupakan gejala alamiah dalam proses kehidupan, bahkan dalam dunia saintifik modern Fritjof Capra dengan tegas mengatakan bahwa perubahan sosial akibat dampak dari modernisme mengalami masalah multidimensional (Capra: 1982).

Secara lebih jelas Parsudi Suparlan menguraikan bahwa perubahan sosial selalu terjadi pada wilayah struktur dan sistem sosial yang berkaitan dengan hubungan keluarga, masyarakat, kebudayaan, sistem sosial-politik dan kependudukan (Suparlan:1997). Perubahan sosial yang alamiah menentukan bentuk dan wajah masyarakat. Dalam perspektif teori konflik, perubahan sosial merupakan proses instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Dalam konflik selalu terjadi dinamisasi konsensus dan integrasi yang berdampak pada perubahan sistem sosial yang ada (Ritzer: 1997). Perubahan dalam struktur sosial yang sistematis dan gradual harus didukung oleh infrastruktur politik, ekonomi dan kondisi sosial-budaya yang terintegrasi. Dukungan tersebut didesain agar tidak

bertabrakan dengan sistem sosial dan norma masyarakat untuk menghindari terjadinya konflik manifest yang merusak tatanan arah perubahan yang ingin dicapai.

Soejono Soekanto, menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan baik dalam ukuran yang paling kecil, yaitu perilaku pribadi ataupun dalam ukuran yang lebih luas yaitu struktur dan budaya masyarakat. Namun faktor-faktor tersebut dapat dibedakan sebagai sumber perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat atau internal (*endogenous*) dan dari luar masyarakat atau eksternal (*exogenous*).¹⁶

Gagasan Revolusi Mental untuk perubahan sosial merupakan cara Indonesia melakukan perubahan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan tersebut dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut *nawacita*. Revolusi mental diharapkan mewarnai sembilan agenda prioritas tersebut, karena pada hakekatnya seluruh bangsa Indonesia dilibatkan langsung dalam usaha revolusi mental tersebut. Keterlibatan tersebut terlihat dari adanya internalisasi nilai-nilai esensial pada individu, keluarga, insititusi sosial, masyarakat sampai dengan lembaga-lembaga negara. Nilai-nilai esensial tersebut meliputi etos kemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi, disiplin, taat hukum dan aturan, berpandangan optimistis, produktif-inovatif-adaptif, kerja sama dan gotong royong, dan berorientasi pada kebajikan publik dan kemaslahatan umum. Untuk mencapai Indonesia yang maju, makmur dan sejahtera serta mandiri diperlukan manusia-manusia unggul dengan pendidikan yang baik, memiliki keahlian dan keterampilan, menguasai teknologi, pekerja keras, mempunyai etos

¹⁶ *Endogenous* dipahami sebagai faktor internal meliputi perubahan kependudukan yang tidak hanya berkaitan dengan angka populasi melainkan kompleksitas masyarakat, distribusi kebutuhan, struktur sosial dan variasi tingkat status sosial masyarakat, temuan, inovasi dan konflikualisme. *Exogenous* dipahami sebagai faktor eksternal meliputi kultur dan lingkungan. Lihat lebih lengkap: Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm.317-325.

kemajuan; selalu menatap masa depan dengan optimis, serta memiliki nilai-nilai luhur yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesai, seperti gotong royong, toleransi, solidaritas, dan nilai-nilai lainnya.

Perubahan melalui jalan revolusi mental dalam ranah sosial memiliki dampak terhadap pembangunan ekonomi. Gagasan revolusi mental merupakan jalan cepat menuju perubahan mentalitas masyarakat baik secara individu maupun secara kolektif, struktural maupun kultural. Perubahan sosial budaya dan ekonomi terjadi seiring dengan perubahan dan pengembangan dunia ke depan. Perubahan kearah yang lebih baik dijelaskan oleh Inglehart '*deep-rooted change in mass worldview are reshaping economic political and social life.*'¹⁷

Di sisi lain, Tilaar menjelaskan, perubahan pada masyarakat selalu memberikan pusat perhatian pada perubahan sosial (*social change*) sehingga memunculkan teori tersendiri terkait kajian masyarakat.¹⁸ Lebih lanjut Tilaar mengemukakan bahwa perubahan di masyarakat disebabkan oleh tiga hal yaitu kebutuhan akan demokratisasi, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, dan globalisasi.¹⁹ Kebutuhan demokrasi mengharuskan terjadinya pergeseran nilai, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengubah perilaku dan gaya hidup serta cara pandang terhadap kehidupan yang berbeda dari sebelumnya, serta globalisasi menghubungkan jarak semakin dekat dan meruntuhkan sekat-sekat pembatas sosial.

Philip H. Phenix dengan jernih menguraikan '*social change can be analyzed in terms of the concept of structure, function and social needs. While no exact laws of social behavior have yet been formulated, some insight may be gained into the basis for individual conformity and derivation and for the transformation that take place*

¹⁷ Ronald Inglehart, *Modernization and Postmodernizations: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies*, (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1997), hlm. 3.

¹⁸ H.A.R. Tilaar *Perubahan sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 3.

¹⁹ H.A.R. Tilaar *Perubahan Sosial...* hlm. 22.

in cultures, institutions, norms, roles and rankings as a result of internal stresses, environmental factors, or external pressures'.²⁰ Faktor yang paling signifikan terhadap jalannya perubahan bagi masyarakat Indonesia ditentukan oleh ke tiga hal seperti yang diuraikan oleh Tilaar dan dikuatkan oleh Phenix.

2.1.2. Nilai-Nilai Esensial Revolusi Mental

Ahimsa-Putra ketika memberikan pemaparan tentang konsep Revolusi Mental menguraikan setidaknya ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu: *Pertama*, bahwa meskipun “mental” adalah sebuah fenomena individual, namun Revolusi Mental dapat terjadi tidak hanya pada individu, tetapi juga pada kolektivitas, baik berupa sebuah komunitas, suku bangsa, masyarakat, maupun suatu bangsa. *Kedua*, perubahan atau Revolusi Mental dapat diwujudkan atau dapat diupayakan, terutama yang menyangkut sebuah kolektivitas - terdapat serangkaian rencana dan upaya yang sistematis dan disusun atas dasar sebuah tujuan yang jelas, dan dapat dilaksanakan apabila konsepsi mengenai Revolusi Mental itu sendiri juga jelas.²¹

Konsepsi Ahimsa tentang Revolusi Mental menegaskan bahwa untuk menggerakkan kekuatan individu dan kemampuan kolektivitas diperlukan internalisasi nilai sebagai dorongan yang secara sadar, mengilhami sebuah gerakan masif dan sistematis. Nilai-nilai esensial dalam Revolusi Mental adalah bagian penting yang secara substantif menjadi energi dalam gerak perubahan.

Gagasan revolusi mental yang diusung Presiden Joko Widodo memuat beberapa nilai-nilai esensial yang sangat penting untuk diekplorasi lebih dalam. Basis argumentasi yang meliputi etos kemajuan,

²⁰ Philip H. Phenix, *Realms of Meaning: A Philosophy of The Curriculum for General Education*, (New York: McGraw-Hill Book Company, 1994), hlm. 131.

²¹ Heddy Shri Ahimsa-Putra, 'Strategi Kebudayaan untuk Revolusi Mental di Indonesia,' dalam Semiarto Aji Purwanto (Editor): *Revolusi Mental Sebagai Strategi Kebudayaan: Bunga Rampai Seminar Kebudayaan tahun 2014*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015), hlm. 138.

etika kerja, motivasi berprestasi, disiplin, serta beberapa nilai-nilai luhur lainnya merupakan nilai esensial yang terkandung di dalam revolusi mental.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa Revolusi Mental adalah transformasi menyangkut keutuhan 3 aspek manusia, yaitu manusia yang percaya, berpikir, dan bertindak dan berlaku dalam cakupan berbangsa dan bernegara yang mencakup seluruh aspek kehidupan.²²

Dalam pandangan Soedjatmoko masalah perubahan yang akan dihadapi ialah bagaimana sebagai bangsa dapat mengisi ruang yang diciptakan atas kemenangan politik dan revolusi. Pengembangan atas perubahan tersebut berada pada wilayah kebulatan adat kebiasaan, organisasi sosial, serta pandangan hidup. Perubahan tersebut meliputi sikap yang baru terhadap perdagangan, uang, menabung, rasa-waktu, sikap lain terhadap hirarki sosial, terhadap pangkat dan derajat, terhadap pekerjaan tangan dan mesin; perubahan tersebut memerlukan kemampuan untuk berpikir secara kuantitatif dan komprehensif.²³

Nilai-nilai esensial dalam revolusi mental harus ditransformasikan kearah perubahan cara pandang seperti yang diuraikan Soedjatmoko, untuk itu perumusan nilai-nilai esensial dapat dikelompokkan dalam tiga pokok pikiran penting, yaitu: ²⁴

1) Integritas, yaitu meliputi nilai Kejujuran, dapat dipercaya, berkarakter, dan bertanggung jawab.

²² Karlina Suppeli, 'Revolusi Mental sebagai Paradigma Strategi Kebudayaan' dalam Semiarto Aji Purwanto (Editor): *Revolusi Mental Sebagai Strategi Kebudayaan: Bunga Rampai Seminar Kebudayaan tahun 2014*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015), hlm. 6

²³ Soedjatmoko, *Etika Pembebasan, Pilihan Karangan Tentang: Agama, Kebudayaan, Sejarah dan Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 9.

²⁴ Tiga pokok pikiran nilai revolusi mental ini disampaikan dalam seminar nasional 'Gerakan Nasional Revolusi Mental Menuju Era Baru Jaminan Sosial Ketenagakerjaan' Jakarta, Selasa, 08 September 2015.

2) Kerja keras, yaitu meliputi nilai etos kerja, daya saing, optimis, inovatif, dan Produktif.

3) Gotong royong, yaitu meliputi nilai Kerja sama, solidaritas, komunal, berorientasi pada kemaslahatan.

Di dalam revolusi mental nilai-nilai moralitas pribadi, seperti kesalehan maupun kerajinan dalam beribadah sebaiknya tidak dijadikan sebagai target. Hal yang lebih urgent untuk dicapai adalah pembenahan moralitas publik, seperti disiplin di tempat umum, membayar pajak, tidak korupsi, maupun moral-moral publik lainnya. Revolusi mental cukup mengurus ranah publik.²⁵

Yudi Latif menterjemahkan nilai Revolusi Mental sebagai alternatif mengatasi krisis multidimensional yang dihadapi bangsa Indonesia dengan tiga pendekatan utama, pendekatan secara mendasar yang bersifat akseleratif, yaitu, revolusi material, mental-kultural, dan politikal.²⁶

Revolusi basis material diarahkan untuk menciptakan perekonomian merdeka yang berkeadilan dan berkemakmuran; berlandaskan usaha tolong-menolong (gotong royong) seraya memberi peluang bagi hak pribadi dengan fungsional.²⁷ Revolusi (superstruktur) mental-kultural difokuskan pada masyarakat beragama yang religius yang berprikemanusiaan, yang egaliter, mandiri, amanah, dan terbebas dari behala materialisme-hedonisme; serta sanggup menjalin persatuan (gotong royong) dengan semangat pelayanan (pengorbanan). Revolusi (agensi) politikal diarahkan untuk mencapai agen perubahan dalam bentuk integrasi kekuatan nasional melalui demokrasi permusyawaratan yang berorientasi persatuan (negara kekeluargaan) dan

²⁵ Paulus Wirutomo, 'Retorika Revolusi Mental', Opini harian *Kompas*, Rabu 29 April 2015.

²⁶ Yudi Latif 'Mental Pancasila' dalam Majalah *Revolusi Mental*, vol. 1- Agustus 2015, Penerbit Pokja Revolusi Mental Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, tahun 2005, hlm. 24. Lihat juga kolom opini harian Kompas edisi 28 Mei 2015 dengan judul yang sama.

²⁷ Yudi Latif, *Mental Pancasila*...hlm. 24.

keadilan (negara kesejahteraan); dengan pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan.²⁸

2.2. Nilai-nilai Agama dalam Pembangunan Ekonomi

Beberapa intelektual misalnya Edward Tylor dalam *Primitive Culture* menyebutkan pengertian agama adalah semesta, makna yang dibangun manusia yang didukung oleh sarana linguistik.²⁹ Durkheim memaknai agama sebagai fakta sosial.³⁰ Agama sebagai materi kajian sosiologi memiliki variasi definisi. Peter L. Berger mengartikan agama sebagai jangkauan terjauh dari eksternalisasi diri manusia, dari peresapan makna-maknanya sendiri ke dalam realitas.³¹ Agama berarti sebuah tatanan manusia yang diproyeksikan ke dalam totalitas kedirian. Dengan kata lain, agama merupakan usaha berani untuk membayangkan adanya keseluruhan semesta sebagai bernilai manusiawi.³² Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa agama telah memainkan peran strategis dalam usaha manusia membangun dunia.³³

Konsepsi umum mendefinisikan agama sebagai suatu ajaran yang berkaitan dengan iman dan tata cara beribadah kepada Tuhan serta bergaul antar sesama dan lingkungan. Dalam rutinitas sehari-hari, dalam lingkungan masyarakat (teistik), agama selalu terletak pada aras ideal dan menjadi suatu tujuan kehidupan manusia. Realitas masyarakat

²⁸ Yudi Latif, *Mental Pancasila...* hlm. 24.

²⁹ Peter L Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, terj. Hartono, (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 203.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 204.

³¹ *Ibid.*, hlm. 35.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

tersebut meletakkan agama sebagai pranata elit yang memiliki ciri-ciri sakral, ideal, transendensi. Kecenderungan agama pada level ke-Tuhan-an pada awalnya tampak tidak berafiliasi dengan pranata komponen kehidupan masyarakat selain agama, seperti ekonomi, politik, hukum, budaya dan lain-lain. Agama menjadi satu-satunya kebenaran kehidupan, yang jika dibandingkan dengan pranata lain memiliki kekuatan dominasi bahkan hegemoni. Agama dapat mengalahkan semua pranata kehidupan tersebut dan menjadi satu-satunya yang tak terkalahkan, tidak lain karena agama terlalu didominasi oleh apologetik sifat Tuhan, sebagai pemilik otoritas tunggal.

Dominasi agama dalam kehidupan masyarakat yang terlalu powertif, tentu saja tidak selalu positif misalkan pada contoh tokoh agama menjadi kaum elit yang sewenang-wenang terhadap pemeluk agama dan kemudian menjadi aktor utama dalam memodifikasi ajaran agama sesuka hati untuk memudahkan mereka mengakses sumber daya yang tidak dimiliki. Pada aras ini, agama menjadi alat legitimasi (*tools of legitamacy*) untuk mengkooptasi sumber daya dalam bidang pranata lain. Malpraktik³⁴ yang dilakukan oleh sebagian tokoh agama tentu memberi kesan negatif atas kesakralan agama dan menimbulkan gerakan protes terhadap agama tersebut. Gerakan protes selalu mengusulkan internalisasi nilai-nilai kemanusiaan ke dalam agama yang sebelumnya mati. Kritik kemanusiaan terhadap agama menjadi pintu masuk bagi perkembangan-perkembangan keagamaan yang asimilasi nilai-nilai kemanusiaan (yang pada dasarnya kemanusiaan sendiri adalah bagian keagamaan).

Salah satu kajian yang sangat mempengaruhi perkembangan ilmu sosial dan keagamaan kontemporer adalah kajian Weber, Durkheim dan Peter L. Berger. Misalkan Weber yang mengkaji relasi agama (Protestan) dengan kapitalisme. Menurut Giddens, Weber menyarankan

³⁴ Malpraktik yang dimaksud adalah penggunaan agama sebagai alasan-alasan yang merugikan masyarakat atau pihak lain, seperti pemungutan upeti/pajak berlebihan dari masyarakat, mengharamkan hal yang belum diatur dalam agama tanpa usaha mengkaji masalah tersebut terlebih dahulu, atau agama yang digunakan sebagai legitimasi politik.

melihat kepada sifat khusus dari kepercayaan-kepercayaan agama (Protestan), bila mana harus menerangkan kaitan agama (Protestan) dengan rasionalitas ekonomi.³⁵ Misalkan Weber menjelaskan hal ini, dengan mengacu kepada tulisan Richard Baxter tentang godaan-godaan kekayaan, yang menurut Weber, peringatan tersebut semata-mata ditujukan kepada penggunaan kekayaan untuk menopang cara hidup bermalas-malasan dan santai. Malas-malasan dan membuang waktu merupakan dosa yang paling utama.³⁶

Temuan Weber dalam *The Protestant Ethic of Capitalism* menjadi instruksi untuk menemukan pengaruh ide-ide keagamaan terhadap perkembangan ekonomi.³⁷ Tidak jauh berbeda dengan Weber, Durkheim mencoba mengulas arti penting dari agama dalam masyarakat, dan mengenalnya sebagai sumber orisinal dari semua gagasan moral, filsafat, ilmu pengetahuan dan keadilan.³⁸ Agama merupakan sesuatu yang benar-benar bersifat sosial.³⁹ Representasi-representasi religius adalah representasi-representasi kolektif yang mengungkapkan realitas-realitas kolektif. Ritus-ritus merupakan bentuk tindakan (*a way of acting*) yang hanya lahir di tengah kelompok-kelompok manusia dan tujuannya adalah untuk melahirkan, mempertahankan atau menciptakan kembali keadaan-keadaan mental (*mental states*) tertentu dari kelompok-kelompok itu.⁴⁰

Durkheim menarasikan bagaimana suatu sistem religi terbentuk secara induksi dari rutinitas yang panjang dalam horizon-horizon individual dan kolektif, tetapi apa yang paling penting adalah Durkheim

³⁵ Lihat Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis Karya Marx, Durkheim, dan Max Weber*, terj. Soeheba Kramadibrata, (Jakarta: UI Press, 2009), 154.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 159.

³⁷ RH. Towny, "Pengantar" dalam Max Weber, *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme*, terj. TW Utomo dan Yusup Pria Sudiarja, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. xxiii.

³⁸ Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis Karya Marx, Durkheim, dan Max Weber*, terj. Soeheba Kramadibrata, hlm. 130.

³⁹ Emili Durkheim, *The Elementary Forms of The Religious Life: Sejarah Bentuk-Bentuk Agama yang Paling Dasar*, terj. Inyik Ridwan Muzir dan M Syukri, (Yogyakarta: IRCidSoD, 2011), hlm. 29.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 29-30.

mengungkapkan pada dasarnya agama dengan pranata non-agama yang telah menjadi sejarah adalah hal kausalitas, artinya terjadi integrasi antara keduanya. Nilai-nilai agama tidak bertentangan dengan upaya pembangunan ekonomi suatu kelompok melainkan terintegrasi dalam hubungan kausalitas antara agama dan representasi-representasi kolektif tersebut.

Kajian-kajian yang melibatkan dua sosiolog di atas memberi sumbangsih bagi perkembangan metodologi-metodologi yang menjelaskan relasi agama dan pembangunan suatu masyarakat, termasuk ekonomi. Misalnya Kuntowijoyo menawarkan beberapa pemikiran epistemologi bagaimana meletakkan agama sebagai sebuah kekuatan energik dalam transformasi sosial. Misalkan dengan cara integralisasi dan objektifikasi. Istilah yang disebut pertama dimulai dari alur agama yang bersifat wahyu. Artinya, selain agama sumber pengetahuan juga berasal dari manusia (*teoantroposentrisme*). Paduan sumber pengetahuan, yaitu agama dan manusia disatukan dengan kehendak post-modern yang mengusung metode holistik atau interdisipliner sebagai penyempurnaan atau kritik terhadap modernisme yang mengusung *diferensiasi*. Kuntowijoyo menyebutnya dengan istilah *dediferensiasi*, yang berarti internalisasi agama ke dalam kehidupan manusia.⁴¹

Tolak ukur dari agama adalah benar-salah, baik-buruk, serta manfaat-merugikan. Terlepas dari hak-hak tersebut, manusia berperan untuk memikirkan dinamika internal ilmu.⁴² Pada perkembangannya, agama akan melahirkan ilmu objektif.⁴³ Apa yang diungkapkan Kuntowijoyo pada dasarnya menunjukkan bahwa agama dan pembangunan merupakan dua entitas yang dapat disatukan melalui metode integralisasi atau objektifikasi agama menjadi ilmu

⁴¹ Baca Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, edisi kedua, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 53-55.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

pengetahuan. Dan dapat dimanifestasikan dalam pembangunan berbagai bidang termasuk ekonomi.

Dua metode yang diungkapkan oleh Kuntowijoyo meletakkan agama sebagai sumber dengan norma agama menjadi titik pangkal objektifikasi dan integralisasi dengan ilmu-ilmu yang lain. Sehingga kontribusi agama melalui nilai-nilai yang ditawarkan menjadi jelas dalam pembangunan terutama ekonomi sebagaimana yang diungkapkan oleh Weber. Beberapa studi di atas menunjukkan relasi agama dengan pembangunan berujung pada studi pandangan tentang agama sebagai objek kajian dan ilmu sosial sebagai perspektif. Sehingga yang muncul adalah agama dipandang sebagai sebuah realitas sosial atau agama itu sendiri merupakan pembangunan sosial itu sendiri.

Taufik Abdullah mencoba menggali persoalan kemungkinan hubungan yang saling mendukung antara kenyataan rohaniah dengan sistem perilaku. Mencoba keluar dari “agama sebagai objek material” menuju “etos kerja” dari masyarakat. Taufik misalkan mengutip definisi etos yang diajukan oleh Geertz, yaitu sikap yang mendasar terhadap diri dan dunia yang dipancarkan hidup.⁴⁴ Etos adalah aspek evaluatif, yang bersifat menilai. Dalam hal ini bisa dipertanyakan: apakah kerja—dalam hal yang lebih khusus usaha komersial—dianggap sebagai suatu keharusan demi hidup, atau sesuatu yang imperatif dari diri, ataukah sesuatu yang terikat pada identitas diri yang telah bersifat sakral? Identitas diri yang dimaksud adalah suatu yang telah diberikan oleh agama. Dalam sudut pembangunan, Taufik mencoba menelusuri asal-usul sebuah etos atau sumber motivasi seseorang dalam perbuatannya.⁴⁵ Pada konteks pembangunan ekonomi maka yang dipertanyakan adalah dasar yang ampuh bagi apa yang biasa disebut sebagai pembangunan tersebut. Bagaimana relasi agama dengan dasar tersebut.

⁴⁴ Taufik Abdullah (ed.), *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, (Jakarta: LP3ES, 1979), hlm. 3.

⁴⁵ *Ibid.*

Jika disadari, apa yang disebut pembangunan ekonomi itu hanyalah suatu manifestasi dari motivasi yang ada di belakangnya, dan bahwa motivasi itu erat hubungannya dengan agama atau ideologi orang yang membangun maka mudah dimengerti bahwa tiap-tiap pembangunan itu, di samping segi ekonominya ada pula segi spiritualnya.⁴⁶ Relasi ini tidak hanya cukup dibuktikan dengan relasi psikologis apalagi apologetik belaka, melainkan harus didukung oleh fakta sosial atau bahkan riset-riset kesejarahan. Berbagai studi telah dilaksanakan untuk menguji kebenaran tesis bahwa ajaran agama yang dianut mempengaruhi tingkat pencapaian dalam usaha.⁴⁷ Tidak seperti Mark, Weber menjauhkan diri dari mempersoalkan corak dan sifat masyarakat kapitalis secara keseluruhan, ia lebih mempersoalkan motivasi, dorongan psikologis dari tindakan.⁴⁸ Sebagaimana yang ditulis oleh Taufik, Weber tampak membuktikan hubungan antara penghayatan agama dengan pola perilaku.

Sebagai sebuah perumpamaan dalam penelitian Weber, etika yang dikaji bersal dari sekte Calvinisme yaitu tentang takdir dan nasib manusia di hari nanti, yang menurutnya adalah merupakan kunci utama dalam dalam hal menentukan sikap hidup dari para penganutnya.⁴⁹ Keraguan atas kepastian nasib akan keselamatan tidak dapat dipastikan dengan sendirinya atau tanpa berbuat apa-apa, maka untuk mewujudkan suatu kepercayaan diri akan nasib baik maka dibutuhkan suatu kerja keras karena hanya dengan kerja keras keraguan religius bisa diatasi.⁵⁰ Dari uraian di atas tampak Weber sebagai seorang pelopor ilmu sosial yang mengarahkan pada pemahaman tentang hubungan timbal balik antara struktur sosial dengan kenyataan rohaniah; antara

⁴⁶ Sjafruddin Prawiranegara, *Agama dan Ideologi dalam Pembangunan Ekonomi dan Bangsa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 6.

⁴⁷ Taufik Abdullah (ed.), *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, hlm. 6.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

⁵⁰ *Ibid.*

dunia sosial dengan kesadaran, yang merujuk pada suatu yang suci yang berada di atas alamiah, transendental dan adikodrati.⁵¹

Sebenarnya untuk menunjukkan relasi nilai agama dalam pembangunan ekonomi dapat ditempuh menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif-tekstual dan pendekatan sosial-kontekstual. Pada pendekatan pertama secara mudah dilacak dogma-dogma agama yang memungkinkan atau yang sangat radikal mendukung pembangunan ekonomi kemudian dikonstruksi berdasarkan teorinya integralisasi dan objektifikasi Kuntowijoyo. Jika menggunakan suatu pendekatan sosial-kontekstual, maka salah satu *concern*-nya adalah melihat kembali historisitas agama baik secara mikro maupun makro. Salah satunya misalkan, mengkaji menggunakan analisis sejarah tentang *bergaining position* agama pada konteks sejarahnya yang panjang. Kedua pendekatan tersebut dapat saja dikatakan pendekatan dialektika pembangunan ekonomi dalam teks dan dialektika pembangunan umat dalam perjalanan sejarah agama tersebut.

2.2.1. Nilai Agama, Etos Kerja dan Produktivitas Manusia

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa Weber memperlihatkan doktrin predestinasi dalam protestanisme mampu melahirkan sikap berpikir rasional, berdisiplin tinggi, bekerja tekun sistematis, berorientasi sukses (material), tidak mengumbar kesenangan, namun hemat dan bersahaja (asketik), serta menabung dan berinvestasi, yang akhirnya menjadi titik tolak berkembangnya kapitalisme di dunia modern. Sejak Weber menelurkan *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, berbagai studi tentang etos kerja berbasis agama sudah banyak dilakukan dengan hasil yang secara umum mengkonfirmasi adanya korelasi positif antara sebuah sistem kepercayaan tertentu dan kemajuan ekonomi, kemakmuran, dan

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 18.

modernitas. Misalkan tesis Rosmiani yang menyebutkan etos kerja terkait dengan sikap mental, tekad, disiplin dan semangat kerja. Sikap ini dibentuk oleh sistem orientasi nilai-nilai budaya, yang sebagian bersumber dari agama atau sistem kepercayaan/paham teologi tradisional. Ia menemukan etos kerja yang rendah secara tidak langsung dipengaruhi oleh rendahnya kualitas keagamaan dan orientasi nilai budaya yang konservatif turut menambah kokohnya tingkat etos kerja yang rendah itu.⁵²

Penelitian tentang etos kerja dan relevansinya dengan nilai agama terbatas pada kajian yang pada dasarnya mencoba membangun kembali relasi kedua entitas tersebut. Penelitian tersebut hanya sebagian kecil dari sistem ekonomi yang melibatkan manusia beragama sebagai pelaku ekonomi atau agensi ekonomi menurut perspektif Giddens. Jika atensi yang dibangun adalah relevansi dogma agama dengan wacana produktifitas manusia dalam sektor ekonomi, maka kajiannya harus juga memasuki pola mikro ekonomi, yaitu pada tahap sistem ekonomi dan bagaimana sistem ekonomi itu tersusun. Proses pembentukan atau penyempurnaan sistem inilah akan dilihat manuver-manuver nilai agama, yang lebih mudah dikaji dengan pendekatan simbol.

Setiap sistem ekonomi,⁵³ dibangun berdasarkan seperangkat nilai-nilai yang membentuk kerangka organisasi ekonominya yang

⁵² Baca Rosmiani, "Etos Kerja Nelayan Muslim di Desa Paluh Sebaji Deli Serdang Sumatera Utara: Hubungan Antara Kualitas Keagamaan dengan Etos Kerja", *Thesis*, (Pada Program Kerjasama Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jakarta dan Pascasarjana UI Jakarta, 1996).

⁵³ Secara umum sistem ekonomi yang dimaksud adalah sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi demokrasi (khusus Indonesia) dan sistem ekonomi berbasis agama (misalnya, wacana sistem ekonomi Islam). Misalnya pada konsepsi tentang kemiskinan, **kapitalisme** akan beranggapan bahwa kemiskinan adalah masalah orang-orang atau negara itu sendiri. Kapitalisme akan cenderung berpandangan bahwa kemiskinan disebabkan oleh yang bersangkutan itu malas, kurang punya kemauan untuk berprestasi, atau terperangkap dalam sistem nilai budaya yang tidak menghargai kekayaan material. Oleh karena itu, kemiskinan baru dapat diatasi dengan "menggarap" si miskin atau negara miskin tersebut, membuatnya lebih termotivasi untuk bekerja, meningkatkan keterampilannya, dan mengubah nilai budayanya. Sedangkan **sosialisme** akan menganggap ketimpangan dan kemiskinan yang terjadi dalam sistem kapitalis disebabkan oleh adanya kepemilikan atau penguasaan secara pribadi terhadap alat-alat produksi. Akibatnya, para pemilik atau penguasa tersebut (para

memiliki hierarki tertentu sehingga dapat dilihat hubungan-hubungan antara nilai dan interaksinya. Dengan demikian, akan dapat dijelaskan eksistensi sistem ekonomi tersebut.⁵⁴ Secara aksiologis hierarki nilai-nilai tersebut akan menunjukkan adanya hierarki strategi dan taktik untuk suatu kerangka referensi yang bersifat tetap (absolut) dan yang selalu berubah-ubah. Nilai-nilai tersebut adalah konsepsi abstrak yang memberikan bentuk dan arah kebijakan strategi ekonomi.

Pada dasarnya, sistematik nilai dari setiap sistem ekonomi adalah sama, yang membedakan adalah substansi nilai tersebut yang ditentukan oleh agama atau aliran pemikiran tertentu.⁵⁵ Perangkat nilai-nilai itu di satu pihak terkait dengan keyakinan atau pandangan filosofis tentang kegiatan ekonomi, dan di pihak lain berhubungan dengan interaksi nilai-nilai yang ada yang membentuk perangkat nilai dasar dan nilai instrumental bagi kegiatan ekonomi yang dikehendaki oleh sistem.⁵⁶ Yang disebutkan kedua tampaknya cenderung pada pragmatisme tujuan ekonomi yang dihasilkan melalui sebuah refleksi kehidupan sehari-hari dan menghasilkan nilai tersebut. Dengan kata lain perangkat nilai-nilai tersebut adalah akumulasi nilai yang diterima oleh masyarakat dalam interaksi kehidupannya dan melahirkan konsepsi ekonomi. Pada tataran tataran inilah, agama sebagai sumber nilai-nilai yang paling otoritatif mendominasi tatanan nilai yang ada

kapitalis) dapat mendikte melalui mekanisme pasar bebas (di mana posisi mereka kuat) tentang pola pembagian laba produksi. Pemilik atau penguasa alat produksi memperoleh bagian yang sangat besar, para pekerja mendapat porsi yang kecil saja sehingga melahirkan ketimpangan dan kemiskinan. Terapi yang ditawarkan adalah penghapusan pemilikan atau penguasaan pribadi atas alat produksi beralih ke tangan masyarakat secara keseluruhan bukan ke segelintir individu. Berbeda dengan kedua model sistem sebelumnya, sistem **demokrasi** tidak mempermasalahkan jenis sistem yang diterapkan, melainkan pada partisipasi publik dalam pengambilan keputusan oleh negara, khususnya dalam mengatur pola pembagian kekayaan yang dihasilkan. Kesuksesan demokratisasi lah yang bertanggung jawab dalam problem kesenjangan dan kemiskinan. Baca Arief Budiman, "Kemiskinan, Pemiskinan, dan Peran Agama: Sebuah Peta Pemikiran" dalam JB. Banawiratma, S.J., dkk. (ed.), *Iman, Ekonomi, dan Ekologi: Refleksi lintas Ilmu dan Lintas Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 31-35.

⁵⁴ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 9.

⁵⁵ Ahmad M. Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Media Da'wah, 1984), hlm. 14. Lihat dalam Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, hlm. 10.

⁵⁶ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, hlm. 10.

dalam masyarakat, meskipun agama dalam lintasan historisnya selalu bergumul dengan nilai-nilai umum konteks kehidupan masyarakat.

Menurut Ahmad M. Saefuddin, terdapat tiga komponen penting yang menyusun eksistensi suatu sistem ekonomi, yaitu: (1) filsafat sistem; (2) nilai dasar sistem; dan (3) nilai instrumental sistem.⁵⁷ Pada komponen filsafat sistem, yang menjadi *concern* adalah prinsip dasar yang memiliki relasi ketat dengan doktrin kehidupan yang terstruktur dalam pola relasi. Misalnya relasi manusia dengan Tuhan, relasi sesama manusia, dan relasi manusia dengan alam (potensi alam).⁵⁸ Filsafat sistem (doktrin-doktrin) tersebut kemudian melembaga dan membentuk pranata nilai (nilai dasar sistem) yang akan membangun kerangka sosial, legal, dan tingkah laku. Dari prinsip-prinsip dasar itulah, dirumuskan nilai instrumental sistem sebagai perangkat peraturan permainan yang menjamin pelaksanaan atau yang menggerakkan sistem itu bekerja.⁵⁹ Dengan kata lain, nilai instrumental sistem ini adalah kongkretisasi filsafat (doktrin-doktrin) dan nilai-nilai dasar sistem menjadi tindakan nyata. Pada konsepsi ini lah, nilai-nilai agama yang mendominasi kehidupan manusia melembaga dengan bentuk “etos kerja”.

Untuk menunjukkan pertautan antara nilai agama dengan etos kerja dan produktivitas manusia baru bisa digambarkan dalam sebuah analisis kasus yang benar-benar terjadi. Tentu saja disiplin yang relevan untuk memaparkannya adalah semiotika. Dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang ditulis oleh Muhammad Djakfar tentang pandangan orang Suralaya tentang kerja keras.⁶⁰ Djakfar mengambil *sample*,

⁵⁷ Ahmad M. Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 14-15. Lihat dalam Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, hlm. 10.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.* Sebagai sebuah perumpamaan, dalam Islam dikenal istilah Fikih Mua'malah. Secara kontekstual, fikih ini adalah instrumen (dalam bentuknya sebagai hukum) menjadi arena negosiasi doktrin-doktrin ketuhanan dan prinsip-prinsip amal saleh dalam Islam dengan realitas ekonomi yang dihadapi oleh umat. Maka di sini, Fikih Mu'amalat sebagai perangkat peraturan permainan yang berisi perkawinan dogma agama dengan interaksi ekonomi manusia.

⁶⁰ Baca Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi: Wacana Menuju Perkembangan Ekonomi Rabbaniyah*, cet. 1, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 234.

bagaimana Haji Saptir, Guntur dan Asnen. Bagi Guntur bekerja keras merupakan bagian dari ibadah, yaitu ibadah sosial. Begitu juga Saptir yang berpendapat setiap muslim harus berjuang guna memperoleh sesuatu. Sedangkan Asnen yang mencoba peruntungan dengan usaha bengkel las. Asnen mendirikan bengkel las sejak tahun 1985 dengan nama “Sumber Rejeki” dan tiga tahun kemudian dia mengganti namanya dengan “Berkah”.

Ketika Asnen ditanya tentang alasan perubahan nama bengkel lasnya, Asnen menjelaskan bahwa ushul perubahan tersebut disarankan oleh guru spiritual Asnen yang menurut Asnen harus dipatuhi. Nama yang lama “Sumber Rejeki” menurut guru spiritualnya Asnen nama tersebut tidak memberi peruntungan yang baik sehingga diubah menjadi “Barokah” guna mengingatkan Asnen bahwa ia bekerja melalui barokah sebagai tanggung jawabnya kepada keluarga.⁶¹ Contoh bengkel las Asnen yang diberi nama “Barokah” yang notabene berasal dari bahasa Arab menjadi fenomena umum dalam kehidupan sehari-hari. Kata barokah dalam nama bengkel las Asnen menjadi harapan dan doa kesehariannya karena hal itu berkaitan dengan agama. Hal ini berarti, kata barokah mengandung nuansa keagamaan sekaligus merupakan simbol yang dimaknai keberuntungan dalam segala aspek kehidupan.

Secara umum, pada masyarakat Suralaya terdapat simbol-simbol keagamaan yang berfungsi sebagai mediator yang mengungkap sebuah makna ajaran agama yang pada akhirnya dapat berimplikasi dalam perilaku masyarakat. Maka simbol-simbol keagamaan seperti, memakai peci putih (dari Mekkah), pergi berhaji, menjadi ulama/*ustadz*, menaati guru, membangun masjid atau surau, selamatan, tahlilan, kirim doa, dan ziarah kubur sangat penting untuk dikaji orientasinya membentuk formasi ekonomi dalam masyarakat Suralaya.⁶² Maka ungkapan J. Biesanz dan M. Biesanz sebagaimana yang dikutip oleh Holt “*Each society has its own characteristic quality, its own ethos that springs*

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 239.

⁶² *Ibid.*, hlm. 238.

from many contributing factors, but particularly from the beliefs and values around which its culture is integrated"⁶³ dapat dijadikan sebuah perspektif untuk membenarkan relasi positif antara agama dan produktivitas manusia, meskipun di satu sisi terdapat faktor yang lain.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disederhanakan bahwa nilai-nilai agama memiliki peluang etis untuk mengkonstruksi tindakan manusia melalui mekanisme transformatif dari tataran nilai menjadi etos kerja dan melahirkan semangat produktivitas ekonomi yang menjanjikan. Tetapi untuk merealisasikan hal tersebut bergantung pada eksistensi *agency* dalam mereproduksi dan melestarikan nilai tersebut ke etos kerja yang berkesinambungan dan kontekstual sehingga produktivitas dapat dimonitoring setiap saat.

2.2.2. Transformasi Nilai Agama dalam Perilaku Ekonomi

Transformasi nilai agama ke dalam perilaku ekonomi pada awalnya berlangsung secara non-organik. Untuk bertransformasi secara berkesinambungan pada tindakan riil, agama harus merasuki sektor organik yang mampu bergerak pada dimensi ruang dan waktu. Karena tindakan ekonomi pada awalnya adalah tindakan dalam batas ruang dan waktu, maka agama pada upaya ini, sangat relevan mewadahi ke dalam institusi-institusi ruang yang hidup dalam masyarakat. Transformasi nilai agama ke dalam institusi akan lebih mudah membentuk perilaku ekonomi secara organik dan terarah. Ketika agama melekat pada institusi-institusi lembaga sosial, maka nilai agama, yang sebelumnya abstraksi, memasuki dimensi riil yang dapat memotori secara langsung perilaku ekonomi suatu komunitas (atau "tindakan" ekonomi seorang individu).

Transformasi nilai agama menjadi institusi-institusi riil akan sangat penting, sebagaimana Durkheim yang mengkategorikan

⁶³ Thomas Ford Holt, *Dictionary of Modern Sociology*, (New Jersey: Littlefield, 1974), hlm. 124.

pendidikan moral⁶⁴ sebagai sebuah fakta sosial yang didefinisikan sebagai cara bertindak, berpikir dan merasakan sesuatu yang berada di luar individu dan dilengkapi dengan alat pemaksa yang dapat mengontrol individu. Konsekuensinya, fakta sosial, yang notabene, di luar diri dapat menguasai individu tersebut. Transformasi ini, dapat ditemukan dengan mengamati perilaku manusia (atau gerakan sosial) dan bukan dengan memeriksa isi pikiran individu tersebut.⁶⁵

Untuk mengerucutkan bahasan ini, yang ingin diungkapkan adalah bagaimana nilai-nilai agama bertransformasi menjadi perilaku ekonomi, sebenarnya dapat disederhanakan dalam istilah “kesalehan ekonomi”.⁶⁶ Untuk melihat transformasi nilai agama ke dalam perilaku ekonomi dapat dipaparkan dengan dialektika antara simbol agama dengan simbol ekonomi. Dialektika dimaknai sebagai proses timbal balik. Misalnya penjelasan Peter L Berger tentang manusia dan masyarakat.

Masyarakat adalah suatu fenomena dialektika, dalam pengertian bahwa masyarakat adalah suatu produk manusia, lain tidak, yang akan memberi tindak balik kepada produsernya. Masyarakat adalah suatu produk dari manusia. Masyarakat tidak mempunyai bentuk lain kecuali bentuk yang telah diberikan kepadanya oleh aktivitas kesadaran manusia. Realitas sosial tak terpisah dari manusia, sehingga dapat dipastikan bahwa manusia adalah suatu peroduk masyarakat.⁶⁷

⁶⁴ Moralitas dalam teori Durkheim bertumpu pada tiga sikap dasar: (1) moralitas dipandang sebagai fakta sosial yang keberadaannya subjektif, sebagai fenomena sosial yang terukir dari kaidah-kaidah tindakan yang dapat dikenali; (2) moralitas merupakan suatu yang bersifat fungsional yang berarti melakukan tindakan tertentu yang secara moral dibenarkan, berarti melakukan tindakan berdasarkan kepentingan kolektif; dan (3) moralitas secara historis terlihat secara evolutif dan berubah sesuai dengan struktur sosial. Taufik Abdullah dan A.C. van Der Leeden (ed.), *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*, (Jakarta: Obor, 1986), hlm. 11.

⁶⁵ Mark S. Cladis, *Emile Durkheim and Moral Education a Pluralistic Society*, (New York: First Publish, 1998), hlm. 18-20.

⁶⁶ Kesalehan di sini dimaknai secara umum, meskipun kata *saleh* sendiri lebih cenderung merujuk pada normatifitas Islam. Ketika dilekatkan dengan kata-kata non-normatif seperti kata “ekonomi”, “sosial”, dan “publik”, maka kata kesalehan menunjuk pada etos atau sikap sosial secara umum. Dengan kata lain kandungan bahasa Arab pada kata tersebut telah direduksi dan kemudian menjadi pranata umum dan tidak melekatkan satu ideologi tetapi ideologi bersama. Kata saleh sudah dianggap sebagai fenomena nasional. Makna kata “kesalehan ekonomi” sepadan dengan kata-kata yang telah lama dikenal, seperti “kesalehan sosial” atau “kesalehan publik” yang tidak membedakan agama, ras, etnis, dan golongan apapun.

⁶⁷ Peter L. Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, terj. Hartono, (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 3.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Berger tersebut maka suatu masyarakat terbentuk dalam sirkulasi sejarah yang penuh dengan dialektika. Konsekuensinya adalah, untuk melihat transformasi nilai agama ke dalam perilaku manusia sama dengan melihat proses dialektis sebagai interrelasi antara entitas yang ada. Proses dialektis tersebut dapat dijelaskan dengan menjelaskan hubungan logis antar entitas, yakni hubungan antara simbol-simbol agama dengan simbol-simbol ekonomi yang bisa berpengaruh pada etos kerja yang tinggi.⁶⁸ Dengan menggunakan bahasa simbol, dialektika tersebut bisa diilustrasikan sebagai berikut.

Agar bisa melaksanakan ritual haji dan mudik, seorang pasti membutuhkan dana yang cukup. Oleh karena itu ia harus bekerja keras membanting tulang untuk mengumpulkan dana tersebut. Haji dan mudik adalah simbol agama. Dana yang cukup berarti harus "kaya". Kaya adalah simbol ekonomi. Bekerja keras adalah etos kerja.⁶⁹

Sebagai contoh lain dapat dilihat dalam ritual ngaben pada masyarakat Bali yang beragama Hindu. Untuk sampai pada ritual tersebut, sebelum mayat dibakar harus dilengkapi aksesoris yang lumayan banyak, sehingga dana untuk mengumpulkannya juga harus banyak. Maka tuntutannya adalah harus bekerja keras, hidup hemat dan tidak boros, serta melaksanakan hukum waris yang sesuai dengan ajaran Hindu. Sama halnya dengan haji, ngaben juga simbol agama Hindu yang terdiri dari nilai-nilai atau filsafat Hindu. Untuk menjamin terlaksananya ritual agama hindu tersebut, seseorang semasa hidupnya harus bekerja keras untuk mengumpulkan dana demi ketenteramannya setelah mati. Kerja keras tersebut adalah etos (dalam bahasa yang konkret adalah perilaku ekonomi).

⁶⁸ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi: Wacana Menuju Perkembangan Ekonomi Rabbaniyah*, hlm. 268.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 269. Haji dan mudik sebagaimana yang dijelaskan di atas merupakan simbol keagamaan bagi orang Madura.

Dalam kajiannya sebagai nilai, simbol-simbol tersebut merupakan representasi ruang dan waktu dari serangkaian nilai-nilai keagamaan dan ekonomi. Interrelasi antara simbol-simbol tersebut berada pada etos, yaitu etos kerja, sama halnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Weber dalam *Protestant Ethic*. Maka dengan bahasa yang sederhana, kesalehan ekonomi terletak pada eksistensi etos kerja yang tinggi dalam kehidupan, yang tidak lain adalah manifestasi spirit keagamaan dan perilaku ekonomi.

Jika pada contoh di atas dijelaskan dengan interrelasi simbol-simbol yang menghasilkan perilaku ekonomi, maka dengan pendekatan internalisasi dan objektifikasi bisa menghasilkan tatanan organisasi keagamaan. Misalnya organisasi masa Islam Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama, atau persatuan-persatuan greja di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial-ekonomi. Gampang saja, nilai-nilai agama, kesamaan agama mengumpulkan beberapa orang membentuk suatu komunitas yang berhubungan dengan gerakan-gerakan sosial yang notabene diawali oleh kesadaran beragama. Agama-agama menyediakan doktrin tentang ketuhanan sekaligus tentang hubungan manusia dengan sesama manusia bahkan alam. Maka potensi inilah yang digali untuk merumuskan perilaku ekonomi tersebut.

2.3. Tokoh Agama sebagai Agen Perubahan

Salah satu agenda besar kemunculan agama sebagai ideologi sosial adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejalan dan searah dengan cita-cita serta visi transformasi sosial.⁷⁰ Berdasarkan sudut pandang sosiologi, agama tidak hanya sebagai pranata ketuhanan tetapi juga merupakan ideologi sosial yang berposisi sebagai pranata pokok bagi setiap pemeluknya. Kuntowijoyo dalam artikel “Paradigma Islam tentang Transformasi Sosial” menyebutkan bahwa semua ideologi atau filsafat sosial, dihadapkan pada suatu pertanyaan pokok, yaitu

⁷⁰ Lihat Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, cet. VI (Bandung: Penerbit Mizan, 1993), hlm. 337.

bagaimana mengubah masyarakat dari kondisinya yang sekarang menuju pada keadaan yang lebih dekat dengan tatanan ideal.⁷¹

Dalam pendekatan sosiologi, agama sebagai institusi moral, etik, ideologi bahkan tatanan sosial dipandang secara holistik atau struktural. Konsekuensinya, agama dalam percaturan sosial tidak berjalan sendiri melainkan melekat pada perangkat-perangkat struktural yang memungkinkan agama tersebut aktif dalam dimensi nyata (ruang dan waktu) pemeluknya. Perangkat struktural dapat berupa agen-agen atau aktor-aktor yang memiliki akses dominan terhadap agama. Agen atau aktor tersebut dapat disebut sebagai tokoh agama.

Secara nalar, tokoh agama bisa dimaknai sebagai deputi kekuasaan atau agen yang menerima otoritas keagamaan. Seperti disebutkan Giddens, bahwa ada dua wajah kekuasaan seperti yang diungkapkan oleh Bachrach dan Baratz.⁷² Mereka menggambarkan kedua wajah kekuasaan ini sebagai kemampuan para aktor dalam melaksanakan keputusan-keputusan yang mereka sukai di satu sisi dan mobilisasi bias yang dilekatkan ke dalam institusi-institusi di sisi lain.⁷³ Menurut Giddens, pandangan ini tidak seluruhnya memuaskan karena mempertahankan konsepsi kekuasaan yang didasarkan pada kalah menang (*zero-sum*). Giddens merekomendasikan konsep dualitas struktur⁷⁴

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Peter Bachrach dan Morton S. Baratz, "The Two Faces of Power" *American Political Science Review*, Vol. 56, 1956. Dalam Anthony Giddens, *Teori Strukturasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*, terj. Maufur dan Daryatno, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 60.

⁷³ Anthony Giddens, *Teori Strukturasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*, hlm. 24.

⁷⁴ Konsep dualitas yang dimaksud ialah relasi antara agensi dan struktur yang perwujudannya berupa praktik sosial (*social practices*) yang dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Praktik sosial itulah sebagai wujud nyata kehidupan sosial manusia dalam masyarakat atau masyarakat sebagai manifestasi kehidupan kolektif manusia, yang menggambarkan hubungan saling timbal-balik. Konsep praktik sosial Giddens sebagai esensi dari perwujudan strukturasi mirip dengan konsep tindakan sosial (*social action*) Max Weber, namun perbedaannya Giddens lebih melihatnya sebagai relasi dualitas sedangkan Weber lebih menekankan pada perilaku aktor yang lebih menunjukkan dualisme dengan tekanan terletak berada pada pengaruh subjek (pelaku, subjek, agen) yang bertindak penuh makna. Baca Haedar Nashir, "Memahami Strukturasi dalam Perspektif Sosiologi Giddens" *Jurnal Sosiologi Reflektif* Vol. 7, No. 1,

dalam relasi-relasi kekuasaan. Sarana atau sumber daya (yang terpusat melalui signifikansi dan legitimasi) merupakan kelengkapan-kelengkapan terstruktur dari sistem-sistem sosial, yang diproduksi dan direproduksi oleh para agen pintar selama terjadi interaksi.

Giddens yang terkenal dengan konsep strukturasinya mencoba mendefinisikan bahwa struktur merujuk kepada aturan, sarana maupun sumber daya dengan perlengkapan-perengkapan struktural yang memungkinkan adanya pengikatan ruang dan waktu yang akan menghasilkan praktik-praktik sosial dalam sistem sosial kehidupan masyarakat.⁷⁵ Struktur menurut Giddens, ialah “hal-hal yang menstrukturkan (aturan dan sumberdaya), hal-hal yang memungkinkan adanya praktik sosial yang dapat dipahami kemiripannya di ruang dan waktu serta yang memberi mereka bentuk sistemis”.⁷⁶ Dalam pengertian ini Tokoh agama sebagai agen yang memiliki sumber daya maksimum, memiliki legitimasi atas nama agama untuk mereproduksi kembali struktur-struktur itu dalam aktivitas-aktivitas keagamaan yang rutin.

Dalam pandangan Giddens, berdasarkan konsep ‘dualitas struktur’ dalam hubungan antara agen dan struktur (*agency and structure*), bahwa ‘struktur’ merupakan medium sekaligus hasil dari tindakan yang ditata secara berulang oleh struktur.⁷⁷ Agen atau pelaku adalah orang-orang yang konkret dalam arus kontinu antara tindakan dan peristiwa. Sedangkan struktur adalah “aturan (*rules*) dan sumber daya (*resources*) yang terbentuk dari dan membentuk perulangan praktik sosial”.⁷⁸

Oktober 2012, hlm 8. Sebagai komparasi dapat dibandingkan dengan istilah yang diajukan oleh Kuntowijoyo, yaitu *binary opposition* (pertentang dua hal). Lihat Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, (Bandung: Penerbit Mizan), hlm. 14-15.

⁷⁵ Haedar Nashir, “Memahami Strukturasi dalam Perspektif Sosiologi Giddens” *Jurnal Sosiologi Reflektif* Vol. 7, No. 1, Oktober 2012, hlm. 3.

⁷⁶ Goerge Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir*, terj. Nurhadi, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hlm. 571.

⁷⁷ Haedar Nashir, “Memahami Strukturasi dalam Perspektif Sosiologi Giddens”, hlm. 3.

⁷⁸ B. Herry-Priyono, *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002), hlm. 19.

Aturan-aturan atau sumber daya sebagaimana pandangan Giddens adalah hal abstrak yang terpisah dari ruang dan waktu. Aturan-aturan tersebut memiliki atribut yang memungkinkannya eksis pada dimensi ruang dan waktu. Atribut tersebut disebut perlengkapan struktural. Melalui perlengkapan struktural tersebut praktik-pratik sosial dalam sistem-sistem sosial kehidupan dapat berlangsung. Tokoh agama adalah salah satu atribut struktural yang memungkinkan pengikatan ruang dan waktu. Agama sendiri menjadi institusi yang melembagakan struktur tersebut (aturan-aturan dan sumber daya). Tokoh agama dan agama terrelasi dalam aturan-aturan agama dan melahirkan otoritas sebagai sumber daya (meskipun menurut Giddens otoritas bukanlah sumberdaya)⁷⁹ dalam patronasenya dengan pemeluk agama.

Pada upaya transformasi sosial atau perubahan sosial menuju keidealan, peran tokoh agama sebagai agen semakin signifikan. Akses tokoh agama tersebut terhadap institusi agama menjadi *leading sector* utama dalam mempertahankan pranata tersebut sebagai media transformatif. Agen perubahan pada mulanya diletakkan di luar diri manusia dan di luar kehidupan masyarakat, yang lebih khusus diletakkan pada kekuasaan supranatural.⁸⁰ Pada perkembangan selanjutnya, agen perubahan ditempatkan di dalam diri “manusia besar” seperti nabi pahlawan, pahlawan, pemimpin, komandan, penemu, pencipta, manusia jenius dan sebagainya.⁸¹ Merekalah penggerak masyarakat, namun kapasitas karismatik mereka bukan berasal dari masyarakat. Kapasitas tersebut diyakini mereka sejak lahir, diwarisi secara genetik dan dikembangkan secara individual.⁸² Pada fase ini agen perubahan mulai dimanusiakan, namun belum dimasyarakatkan. Dengan lahirnya sosiologi, terjadi peristiwa yang sangat mengejutkan, yaitu agen perubahan mulai dimasyarakatkan dan bahkan memiliki peran sosial.

⁷⁹ Lihat Anthony Giddens, *Teori Struktural: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*, hlm. 25.

⁸⁰ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan*, terj. Alimandan, (Jakarta: Prenanda), hlm. 223.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

Contoh konkret pada skop lokal, misalnya dalam kehidupan sosial keagamaan di Lombok pemuka agama Islam disebut *tuan guru*. Gelar *tuan guru* adalah sebutan yang diberikan oleh masyarakat bagi seseorang yang memiliki pengetahuan agama Islam yang tinggi, sebagai wujud pengakuan mereka terhadap kelebihan-kelebihan yang dimiliki seseorang.⁸³ *Tuan guru* sebagai tokoh agama memiliki aktivitas sehari-hari memberikan ceramah pengajian pada hari-hari tertentu, menjadi konsultan keagamaan Islam apabila terjadi perbedaan paham dalam masyarakat, pemimpin doa kematian, bahkan mengajar di instansi pendidikan Islam lokal. Pada dasarnya aktivitas *tuan guru* dalam kehidupan sehari-hari didominasi oleh kegiatan dakwah di tengah-tengah masyarakat dan mengajar pada institusi-institusi pendidikan keagamaan.

Rutinasinya sebagaimana di atas merupakan upaya produksi dan reproduksi struktur dalam dimensi ruang dan waktu sebagaimana yang diajukan Giddens. Titik tolak Giddens adalah praktik atau tindakan manusia yang dapat dilihat sebagai pengulangan. Artinya, suatu aktivitas tidak dihasilkan sekali jadi melainkan dihasilkan secara terus menerus melalui suatu cara yang kemudian memunculkan seorang tokoh yang menyebut dirinya sebagai aktor.⁸⁴ Tokoh agama sebagai agen terlibat dalam rutinasinya tersebut dengan terus menerus memonitor pemikiran dan aktivitas mereka sendiri.⁸⁵ Tokoh agama dalam rutinasinya tersebut bersama dengan agen kolektif (pemeluk agama, asosiasi ekonomi, politik, kelompok tugas, asosiasi, tentara, dan sebagainya) melakukan interaksi dan mereproduksi struktur secara terus menerus, sehingga membentuk suatu struktur parental yang dinamis dan suatu saat siap direvisi sesuai keadaan ruang dan waktu.

⁸³ Jamaludin, *Sejarah Sosial Islam di Lombok Tahun 1740-1935 (Studi Kasus Terhadap Tuan Guru)*, (ttt: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 142. Padanan istilah *tuan guru* adalah kiai untuk daerah Jawa.

⁸⁴ Siti Rohmatul Fauziah, "Peran Tokoh Agama Dalam Masyarakat Modern Menurut Anthony Giddens" *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam), hlm. 64.

⁸⁵ *Ibid.*

Kemampuan tokoh agama dalam memahami dan melaksanakan pranata normatif agama menjadi titik awal dalam memperoleh legitimasi dari agen kolektif. Pada keadaan itu pula tokoh agama menjadi aktor yang memainkan hegemoni keagamaan dengan status elit agama. Keadaan semacam ini memungkinkan tokoh agama bisa memberikan kontribusi ke agen kolektif baik dengan berbagai peran misalnya sebagai pendidik moral berbasis kearifan agama baik yang mencakup humanisasi ataupun transendensi. Pada tingkat yang lebih akademis, dengan kemampuannya dan segala karismanya, tokoh agama sangat mungkin merasionalisasikan norma-norma agama yang sulit dipahami menjadi penafsiran yang lebih sederhana dan relevan bagi kebutuhan pemeluk agama atau bahkan untuk menjaga eksistensi agama itu sendiri atau mengikuti *trend* toleransi atau bahkan sebagai tanggung jawab kenegaraan.

Jika mencoba melihat salah satu sejarah tokoh agama sekaligus sejarah kebangsaan di Jawa Timur, yaitu pada peristiwa menjelang pertempuran 10 November melawan Inggris yang tergabung dalam AFNEI (*Allied Forces Netherlands East Indies*) atas nama Blok Skutu.⁸⁶ Peristiwa tersebut juga melibatkan tokoh agama misalnya KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah dan santri-santrinya. Pada saat itu, salah satu doktrin yang menjadi motivasi perjuangan adalah membela tanah air tidak hanya kewajiban berbangsa tetapi juga sebagai bagian kewajiban agama. Kelenturan doktrin agama sebagaimana disebutkan tersebut menjadi penjelasan bahwa tokoh agama selalu aktif memformulasikan struktur guna memainkan peran perubahan sosial.

Peran yang berbeda misalkan sebagai agen utama yang mengukuhkan solidaritas sosial terutama di daerah-daerah pedesaan yang memiliki basis masyarakat keagamaan yang relatif kental. Pada kondisi semacam ini tokoh agama bertindak sebagai pemimpin sosial guna melaksanakan ritual keagamaan yang teratur, bahkan ritual adat akan tetapi dibumbui nilai-nilai keagamaan. Salah satunya adalah ritual

⁸⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_10_November akses pada tanggal 20 juli 2015.